

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAN KOMITE SEKOLAH DI MTs NW
MALUK TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Pendidikan Mandalika Guna Melakukan Penelitian
Dalam Rangka penyusunan skripsi**

Oleh:

**YULIANA SARI
NIM. 16 13 1015**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
2021**



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
Alamat: Jln. Pemuda No.59a Telp/Fax(0370)638991 Mataram

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi berjudul : “Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah Di MTs NW Maluk”. Disetujui untuk dikembangkan menjadi skripsi.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hardiansyah S,Pd, M.M.Pd
NIK. 201311030

Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd
NIK.200611037

Tanggal Penetapan :

An. Dekan FIPP,

Wakil Dekan I

Suharyani, M.Pd
NIK.200709045

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah Di MTs NW Maluku” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan prodi Administrasi Pendidikan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Wayan Tamba M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi;
2. Bapak Hardiansyah S,Pd, M.MPd selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan. sekaligus pembimbing I.
3. Bapak Dr.Muhammad Iqbal, M.PD selaku dosen pembimbing II
4. Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendukung juga mendoakan;
5. Dan semua pihak yang tidak disebutkan dan telah membantu tersusunnya proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih banyak kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak. Dengan demikian semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan segala niat baik kita mendapatkan berkah dan karunia-Nya.

Mataram, Juni 2021
Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori.....	6
B. Penelitian Yang Relevan	17
C. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu	26
C. Fokus Penelitian.....	266
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik pengumpulan data	30
F. Teknik Analisis Data.....	322
G. Tahapan Penelitian	333
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Melalui Komite sekolah masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya

pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator (Amirunsyah, 2014:1)

Efektivitas peran masyarakat dalam wadah komite sekolah sangat bergantung kepada kreativitas dari lembaga tersebut dalam melahirkan dan menjalankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap program-program sekolah. Makna kreativitas dalam kelembagaan komite sekolah melekat pada orang-orang yang mengisi organisasi termaksud.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi masyarakat antara lain: obyektif, jujur, menggunakan tolok ukur kepentingan sekolah, dilaksanakan secara sistematis, serta dianalisis secara cermat mungkin. Obyektif berarti apa adanya, tidak ditambah juga tidak dikurangi. Jujur berarti tidak ada niat atau pretensi mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak meremehkan potensi yang sesungguhnya cukup besar. Menggunakan tolok ukur kepentingan sekolah, artinya melihat potensi itu dari sudut pandang kebutuhan sekolah saat ini maupun yang akan datang. Dilakukan secara sistematis) artinya direncanakan lebih dahulu, dilaksanakan sesuai rencana, dan hasilnya didokumentasikan sebaik-baiknya. Potensi yang sudah didokumentasikan perlu dianalisis lebih lanjut oleh para pengelola sekolah, dapat juga dibahas bersama pengelola di luar sekolah, kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan kerjasama sekolah dengan masyarakat.

Namun, menurut buku dari (Pudjo Sumedi 2011:166) selalu saja terjadi permasalahan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan, demikian pula halnya dengan kehadiran kebijakan komite sekolah yang masih dirasakan sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masalampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka. Dari beberapa kondisi latar belakang di atas menjadi pertimbangan dipilihnya tema ini menjadi bahan kajian dalam penulisan ini. Permasalahan implementasi kebijakan ini sangat menarik dan penting untuk dibahas, dengan pertimbangan berdasarkan kondisi implementasi kebijakan Komite Sekolah di atas bahwa : 1) adanya kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai komite sekolah 2) Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam mengimplementasi kebijakan tersebut di sekolah 3)adanya aturan dari sekolah tentang kebijakan komite sekolah dan di atur langsung oleh sekolah . dari pernyataan di atas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman rumusan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai komite sekolah MTs NW Maluk?

2. Bagaimanakah persepsi stakeholder terhadap peran komite sekolah di MTs NW Maluku?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan mengenai komite sekolah dalam mutu pendidikan MTs NW Maluku?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang kebijakan mengenai komite sekolah di MTs NW Maluku.
2. Memberikan gambaran stakeholder terhadap peran komite sekolah di MTs NW Maluku.
3. Melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan mengenai komite sekolah di MTs NW Maluku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep atau pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para insan akademik yang sedang meneliti tentang implementasi kebijakan peran komite sekolah, selain itu juga menjadi sebuah nilai kekhasan pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari manfaat kritis dapat disimpulkan manfaat praktis pada penelitian ini :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas lebih mendalam tentang permasalahan program implementasi kebijakan peran komite sekolah.

b. Bagi Sekolah

Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk perencanaan program-program di sekolah dalam upaya melancarkan implementasi kebijakan peran komite sekolah

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang pentingnya pendidikan mengenai komite sekolah, bisa dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan Menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal.

Menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan tujuan ideal. Menurut Nichols, bahwa :“ kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy, bahwa : “kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. (Jaya, 2019:1)

Menurut Ali Imron () dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu Pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri. Kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. (rafa , 2019:4)

2. Kebijakan Komite sekolah

Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas keputusan menteri nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya pada tingkat satuan dapat dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat. UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa

komite sekolah / madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75

Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta.

Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Implementasi kebijakan peran komite sekolah sebagai realisasi dari Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan

fungsinya secara optimal dengan dukungan dari keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada bab di atas, kepengurusan komite sekolah telah mengikuti aturan dengan jumlah anggota minimum 11 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah. Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan (dilihat dari aspek sumber daya) mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki (komunikasi). Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai minat menjadi anggota komite sekolah dalam hal ini anggota komite sekolah memiliki komitmen dan kejujuran (disposisi). Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah dan tidak melalui pemilihan dalam suatu wadah (organisaasi).

Beberapa orang yang dulunya adalah anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite sekolah dan tugasnya diperluas. Kepengurusan komite sekolah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kepala sekolah. Pertemuan-pertemuan formal dilakukan secara regular misalnya setiap satu bulan, satu semester, dan satu tahun. Komite sekolah sering mereka diundang

oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah. (Abang,2016:)

a. Aturan Tentang Komite Sekolah

Melatar belakangi Pertimbangan penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Dan Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah Komite sekolah merupakan suatu badan yang mandiri dan berkedudukan di satuan pendidikan, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/ 2002, bahwa kedudukan dan sifat komite sekolah adalah sebagai berikut: (1) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan; (2) Komite sekolah dapat terdiri atas satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuansatuan pendidikan yang dikelola oleh suatu

penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya; (3) Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Dasar hukum penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Implementasi kebijakan peran komite sekolah sebagai realisasi dari Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dengan dukungan dari keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur organisasi. Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada bab di atas, kepengurusan komite sekolah telah mengikuti aturan dengan jumlah anggota minimum 11 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah. Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan (dilihat dari aspek sumber daya) mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki (komunikasi). Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai minat menjadi anggota komite sekolah dalam hal ini anggota komite sekolah memiliki komitmen dan kejujuran (disposisi). Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah dan tidak melalui pemilihan dalam suatu wadah (organisaasi).

Beberapa orang yang dulunya adalah anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite sekolah dan tugasnya diperluas. Kepengurusan komite sekolah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kepala sekolah. Pertemuan-pertemuan formal dilakukan secara regular misalnya setiap satu bulan, satu semester, dan satu tahun. Komite sekolah sering

mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah. (Amirunsyah, 2014:)

3. Peran komite sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/ sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah :

- a. Sebagai lembaga pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- c. Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Angriani,2017:2)

Sementara itu, untuk menjalankan peran komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Adapun Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang nyata maupun tidak nyata. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Sirajuddin, 2016 dalam tesis yang berjudul : peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di SDN 124 paroto kecamatan lilirilau kabupaten soppeng. lembaga : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun tujuan penelitian: Berpijak dari pokok permasalahan di atas,

maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut: a. Untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. b. Untuk mengetahui peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. dengan jenis penelitian yang digunakan: metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian: Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 1) Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto Mutu Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 124 Paroto dapat dikatakan cukup baik. 2) Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto: a) Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency): Komite SDN 124 Paroto: sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbanagannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, misalnya pengadaan ruang sholat (mushalla), pengadaan perlengkapan sholat (mukenah, sarung, tikar sholat dan sajadah), selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS. : b) Sebagai badan pendukung (supporting agency), peran komite sekolah sebagai

badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama islam di SDN 124 Paroto, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. : c) Sebagai badan pengontrol (controlling agency), komite sekolah di SDN 124 Paroto melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di SDN 124 Paroto dengan mengontrol proses belajarmengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas sekolah seperti, penambahan gambar-gambar huruf hijaiyah, dan gambar gambar yang bernuansa islami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. : d) Sebagai badan mediator (Executive), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat.

2. Herisfina Fauziah, 2018 dalam tesis yang berjudul : Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP NEGERI 3 CISAUK. Lembaga : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk: Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “untuk menjelaskan optimalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Cisauk” : ada pun analisis data yang di gunakan:

metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan: teknik wawancara, teknik wawancara dan dokumentasi : adapun teknik analisis data merupakan: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan. : Hasil yang diperoleh : Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 03 Cisauk sudah optimal didalam beberapa peran seperti peran komite sebagai pemberi pertimbangan, dan peran komite sebagai mediator. Namun, dalam perannya sebagai badan pengontrol dan pendukung dapat dilihat komite sekolah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari: Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dan sebagai mediator sudah optimal dapat dilihat dari aktifnya komite dalam mendukung program-program yang ada disekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selain itu, komite sekolah juga memberikan ide-ide serta saran kepada sekolah terkait program-program yang ada disekolah serta ikut serta dalam mendanai program sekolah yang telah disetujui oleh komite sekolah. Komite sekolah juga dapat menjembatani dengan baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga jika terjadi keluhan orang tua langsung bisa berkomunikasi dengan komite.

3. Windi Retno Bintari, 2014, dalam tesis yang berjudul : Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di Sd Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012. Lebaga : Universitas Negeri Yogyakarta Januari. Adapun tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan peran Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri Megulung Lor pada Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis

penelitian yang di gunakan : Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Nana Syaodih (2010: 72) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alami maupun fenomena rekayasa manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan: Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu sebagai berikut.: 1) Wawancara atau yang dapat disebut sebagai interview menurut S. Margono (2005: 165) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Sugiyono (2009: 231) menjelaskan pengertian wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.: 2) Dokumen menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2012: 216) adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Sementara menurut Sugiyono (2009: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau pun karya-karya monumental dari seseorang. Adapun teknik analisis data: Proses analisis data kualitatif meliputi analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan. Menurut Sugiyono (2009: 336) analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan yang akan menjadi fokus penelitian sementara. Sementara analisis selama di lapangan dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dengan jangka waktu tertentu. Hasil yang diperoleh : Bab ini secara umum disajikan hal-hal berkaitan dengan hasil

penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini dibahas masalah lokasi penelitian, mutu SD N Megulug Lor dan pelaksanaan peran Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah tersebut mencakup: (1) peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan; (2) peran Komite Sekolah sebagai pendukung; (3) peran Komite Sekolah sebagai pengontrol; dan (4) peran Komite Sekolah sebagai mediator. Hal tersebut diuraikan di bawah ini.

4. M. MIRHASAN, 2019, dalam tesis yang Judul Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Bandar Lampung. Lembaga : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H /2019 M. adapun tujuan yang digunakan : Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan : metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts Negeri 2 Bandar Lampung. : 1) Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 2) Observasi Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi partisipan, karenanya dalam studi ini peneliti bertindak tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sekaligus sebagai instrument penelitian dengan tujuan berusaha menstimulus yang diteliti agar mengetahui realitas masalah yang sebenarnya sehingga data dapat diperoleh secara obyektif dan akurat. 3) Dokumentasi Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barangbarang tertulis,⁶⁰ maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil yang diperoleh : Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, mutu pendidikan di MTsN 2 Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik, hal ini disampaikan oleh ketua komite MTs N 2 bandar lampung.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran kebijakan yang mengatur tentang komite sekolah dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di MTs NW Maluku ?
2. Bagaimanakah persepsi stakeholder terhadap peran komite di MTs NW Maluku?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang komite sekolah dalam menentukan mutu pendidikan di MTs NW Maluku ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “ implementasi kebijakan peran komite sekolah di MTs NW Maluk. Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian kualitatif menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian *naturalistic*. Istilah “*naturalistic*” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “ pengambilan data secara alami atau natural.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sebagai berikut ini:

B. Tempat dan Waktu

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jln.Amanah Desa. Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Di MTs NW Maluk. Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2021.

C. Fokus Penelitian

1. Kebijakan mengenai komite sekolah

Implementasi kebijakan peran komite sekolah sebagai realisasi dari Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu kominikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dengan dukungan dari keempat variabel tersebut yaitu kominikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

2. Stakholder

Jadi stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka stakeholder adalah : Birokrasi pendidikan (dinas pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guruguru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Dengan kata lain stakeholder adalah orang-orang, atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di

sekolah. Yang terkait dalam berkempetingan dalam sekolah yaitu dinas Pendidikan, kepala sekolah, wakasek, wali atau orang tua, organisasi NW.

3. Implementasi Mutu

Peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintahan daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Mutu lembaga pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari input (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga output (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan. Seiring berjalannya waktu upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan terus ditingkatkan, baik dari sarana dan prasarana, kualitas guru dan manajemen pendidikan. (Diah Rachmawati Masita 2018)

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis penelitian

a. Kualitatif

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebab penelitian ini adalah penelitian yang akan mengungkapkan suatu fenomena melalui

deskripsi bahasa non-statistik secara holistik. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variable penelitian.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu dinas pendidikan, wali atau orang tua, kepala sekolah atau wakasek, dan organisasi NW individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; (a) Catatan hasil wawancara. (b) Hasil observasi lapangan (c) Data-data mengenai informan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang

telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

1. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara, (2) dokumentasi (3) observasi

a. Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang terkait dengan program peran komite sekolah yaitu Kepala komite dan Kepala sekolah, dengan memberikan pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara mengenai proses penyelenggaraan program peran komite sekolah. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peran komite sekolah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan komite sekolah.

b. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara. Adapun dokumen yang diperlukan yaitu informasi mengenai implementasi kebijakan komite sekolah maka peneliti memerlukan data arsip berupa kebijakan tentang komite sekolah, jumlah peserta didik, jumlah guru, data sarana dan prasarana yang dapat diperoleh melalui satuan pendidikan.

c. Observasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan segala indera.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi. Yaitu melihat-lihat lokasi penelitian, memperhatikan perilaku informan, mendengarkan pendapat informan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS NW Maluk.

2. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logiknya.

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian,
- b. peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus,
- c. tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yng dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia,

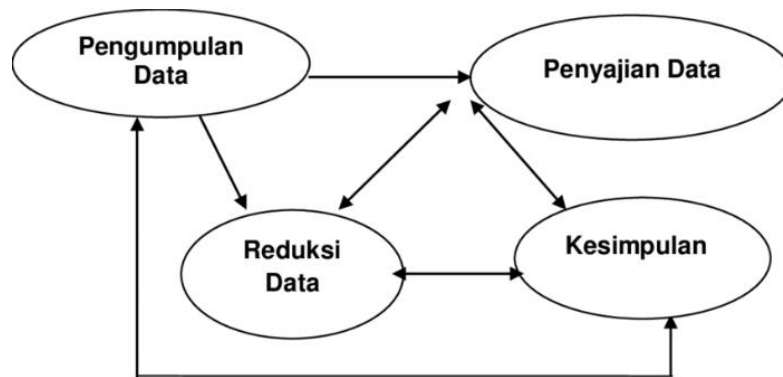
- d. suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita,
- e. peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika,
- f. hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1984) yaitu menggunakan empat tahapan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, yaitu pada tahap ini, seluruh data yang telah diperoleh mengenai implementasi kebijakan komite sekolah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan komite sekolah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kebijakan komite sekolah dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. (2) Reduksi data, yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu dari data yang telah dikumpulkan. (3) Penyajian data, setelah direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif agar mudah

dipahami dan menentukan kerja selanjutnya. (4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan dan kemudian disimpulkan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bermakna.

Gabar 3.1 Analisis Data



(Sumber : www.researchgate.net)

G. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Dalam penelitian di bidang apapun, tahapan-tahapan itu pada umumnya memiliki kesamaan, walaupun ada beberapa hal sering terjadi pemodifikasian dalam pelaksanaannya oleh peneliti sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam proses penelitian.

Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu:

1. Persiapan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, penelitian harus mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Penelitian membutuhkan persiapan-persiapan yang matang sebagai persyaratan untuk menunjang kelancaran proses penelitian. Persiapan-persiapan penelitian meliputi:

a. Persiapan izin penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian tentang implementasi peran komite sekolah dalam membangun sarana dan prasarana di sekolah terlebih dahulu peneliti melakukan persiapan-persiapan yang terkait dengan prosedur untuk mendapatkan surat izin penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengurus surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian dari fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika Mataram.
- 2) Mengantarkan surat permohonan mengadakan izin penelitian dari fakultas ilmu pendidikan dan psikologi UNDIKMA ke Bappeda Sumbawa Barat.
- 3) Mengantarkan surat tembusan dari Bappeda ke Sekolah pada tanggal 1 juli 2020
- 4) Selanjutnya mengambil surat keterangan pernah melaksanakan dari sekolah sebagai bukti telah melaksanakan penelitian

b. Penyusunan instrumen penelitian

Penyusunan instrumen penelitian bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen wawancara sebagai instrumen yang didukung oleh metode dokumentasi dan observasi.

Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing, maka instrumen wawancara dan pelengkapannya akan ditanyakan pada saat penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber akan menjadi data pokok penelitian dijadikan dasar dalam menguji metode yang diajukan.

b. Analisis Data

Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan dihipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.

3. Laporan Penelitian

Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NW
MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 51/10/MTs.NW/VIII/2018
Tanggal : 06 Agustus 2018
Tentang : Komite Madrasah

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ma'shum, S.Pd	Ketua Komite Madrasah	
2	Kamaluddin, SH	Sekretaris	
3	Nurman	Bendahara 1	
4	Sri banun Rahmawati, S.PdI	Bendahara 2	
5	Salch Mansur	Anggota	
6	Sapiin	Anggota	
7	Jabaruddin	Anggota	
9	Adisan, S.Pd	Anggota	
10	Mahdar, S.Pd	Anggota	

Ditetapkan : Di Maluk
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018


Kepala Madrasah,

MOH. ASRI WANDI, S.PdI
NIP.

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH
MTs NW MALUK
PERIODE 2018-2021

Pada Hari ini Sabtu tanggal 22 Dzulqaidah Tahun 1439 H bertepatan dengan tanggal 4 Agustus tahun 2018 telah dilaksanakan rapat penggantian pengurus Komite MTs NW Maluku periode 2018-2021 bertempat di gedung MTs NW Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat.

Maluk, 22 Dzulqaidah 1439 H
04 Agustus 2018 M

Kepala MTs NW Maluku

MOH ASRI WANDI, S.PdI

LAPORAN BULANAN MTs NW MALUK
BULAN : DESEMBER 2020

A. KEADAAN UMUM

1. Nama RA/Madrasah : MTs NW MALUK
2. Siap ID RA/Madrasah :
3. Nomor Statistik RA/Madrasah : 121252070009
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50223168
5. Status RA/ Madrasah : SWASTA
6. Alamat RA/Madrasah
 - Jalan : Jl. Amanah
 - RT/RW : 09/03
 - Kelurahan/Desa : Mantun
 - No. Telp/HP : 081909010705
7. Kecamatan : Maluku
8. Kabupaten : Sumbawa Barat
9. Provinsi : Nusa Tenggara Barat
10. Kode Pos :
11. Penyelenggara : Yayasan Sabiliirasyad Nahdlatul Wathan
12. Dibuka Tahun : 2008
13. SK Izin Operasional
 - Nomor : Kd.19.09/3/PP.03.2/001/2010
 - Tanggal : 15 Januari 2010
14. SK Pencatatan
 - Nomor :
 - Tanggal :
15. Jabatan Kepala RA/Madrasah
 - Nomor SK : 01/3/YS.NW/XII/2018
 - Tanggal : 28 Desember 2018
16. Akreditasi : Sudah
 - Nomor SK : 246A/BAP-SM/KP/XII/2015
 - Nilai : 73
 - Peringkat : B
 - Tanggal : 26 Desember 2015
17. Kurikulum : 2013

B. KEADAAN TANAH

- Luas Tanah RA/Madrasah : 1000 m²
- Luas Bangunan : 162 m²
- Luas Halaman : 838 m²
- Status Tanah : Milik
- Status Gedung : Milik
- Keadaan Gedung RA/Madrasah : Baik

C. KEADAAN SISWA

1. Siswa

KELAS	JURUSAN	Akhir bulan lalu			Masuk bulan ini			Keluar bulan ini			Akhir bulan ini		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
7		13	7	20							13	7	20
8		14	9	23							14	9	23
9		15	7	22							15	7	22
		42	23	65									65

2. Jumlah Siswa Menurut Usia

No	Jenis Kelamin	RA				MI				MTs				MA			
		< 6	= 6 - 7	> 7	Total	< 7	= 7 - 12	> 12	Total	< 13	= 13 - 15	> 15	Total	< 15	= 15 - 17	> 17	Total
1	Laki-Laki									4	24	3	31				
2	Perempuan									7	26	3	36				
	TOTAL									11	50	6	67				

D. KEADAAN GURU DAN PEGAWAI

1. Guru

NO	STATUS	I/P	PENDIDIKAN					GOL				
			SLTA	DIPLOMA	S1	S2	Jumlah	II	III	IV	Jumlah	
1	PNS Kemendik	L										
		P										
2	PNS Lainnya	L										
		P										
3	GT	L			4		4				4	
		P			3		3				3	
4	GTT	L			4		4				4	
		P			2		2				2	
	TOTAL				2		2				2	

2. Pegawai

NO	STATUS	I/P	PENDIDIKAN					GOL				
			SLTA	DIPLOMA	S1	S2	Jumlah	II	III	IV	Jumlah	
1	PNS Kemendik	L										
		P										
2	PNS Lainnya	L										
		P										
3	PT	L										
		P										
4	PTT	L	1									
		P										
	TOTAL		1								1	

E SARANA DAN PRASARANA
1 Kondisi Ruangan

NO	RUANG	Jumlah	KONDISI				Total
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Kepala Madrasah	1	1				1
2	Tata Usaha						
3	Guru	1	1				1
4	Kelas	3	3				3
5	Ruang BIP						
6	Ruang UKS						
7	Ruang OSIM/PMR						
8	Ruang Perpus	1				1	1
9	Lab. IPA						
10	Lab. Fisika						
11	Lab. Kimia						
12	Lab. Bahasa						
13	Ruang Komputer						
14	Musolla						
15	Aula						
16	WC Guru	1	1				1
17	WC Siswa	1	1				1
18	dll						
Total		7	6			1	7

2 Jumlah Meja, Kursi Guru dan Siswa

NO	Urutan	Jumlah	KONDISI				Total
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Meja Guru	3			2	1	3
2	Meja Siswa	53	53				53
3	Kursi Guru	3		3			3
4	Kursi Siswa	20	50	4	6		60
5	Papan Tulis	3		3			3
6	dll						
Total		109	62	27	13	7	109

F BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

No	Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Jumlah Bantuan	Tahun	Ket
1	Rehab Ringan	Kasubid Kemendikbud	85.000.000	2012	
2	Rehab	Kemendikbud	75.000.000	2018	

G PELAKSANAAN UAMBN/UN TAHUN SEBELUMNYA

1 Peserta

No	Jurusan	Peserta			Lulus			%
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1		6	5	11	5	5	10	90

2 Nilai UN Pada Tiap-tiap Mata Pelajaran Tahun Sebelumnya

No	Jurusan	Mata Pelajaran	Nilai		
			Minimum	Maksimum	Rata-rata
1		Bahasa Indonesia	38,00	74,00	55,56
2		Bahasa Inggris	30,00	70,00	44,67
3		Matematika	27,50	55,00	38,51
4		IPA	30,00	62,50	43,33

3 Nilai UAMBN Pada Tiap-tiap Mata Pelajaran Tahun Sebelumnya

No	Jurusan	Mata Pelajaran	Nilai		
			Minimum	Maksimum	Rata-rata
1		Qur'an Hadits	52,33	84,00	69,25
2		Akhlak Akhlak	72,00	86,00	80,50
3		Fiqh	68,00	84,00	69,18
4		S.K.P	62,00	82,00	64,00
5		Hadis Arab	60,00	86,00	66,88

Maluk, 31 Desember 2020

 Kepala Sekolah
 I. W. K. H. A. W. W. W. S. Pd

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yuliana Sari

Nim : 16131005

Jurusan : Administrasi pendidikan

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah di MTs NW Maluku,
Jln. Amanah Desa. Mantun Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat.

A. Wawancara Dengan Dinas Pendidikan

1. Apakah ada peraturan kebijakan di tingkat daerah (pengkabupaten atau dinas pendidikan) yang mengatur tentang komite sekolah? kalau ada, boleh kami minta copy-nya?
2. menurut bapak/ibu, bagaimana peran komite sekolah terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, khususnya di sekolah swasta? apakah peran tersebut sudah berjalan optimal atau belum?
3. kalau sudah, apa yang menjadi faktor pendukungnya? kalau belum, apa yang menjadi kendala atau faktor penghambatnya?
4. menurut bapak/ibu, apa saja yang bisa dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah swasta?
5. ke depannya, bagaimana harapan dinas pendidikan terhadap peran komite sekolah ini ?

B. Wawancara Dengan Orang Tua Siswa

1. Apakah Komite Sekolah berperan sebagai penghubung atau mediator antar pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat? Apakah peran ini sudah ditentukan ?
2. Dengan adanya dana BOS, apakah masih ada pungutan biaya Komite Sekolah kepada orang tua peserta didik?
3. kalau misalkan dana bos kurang, apakah bapak/ibu setuju jika komite sekolah menarik pungutan untuk mendukung proses belajar mengajar?

C. Wawancara Dengan Kepala Sekolah

1. Komite Sekolah adalah mitra kerja Kepala Sekolah, apakah Komite Sekolah memberi pertimbangan apabila ada program Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Apa saja contohnya?
2. Apakah Komite Sekolah memberikan pertimbangan dan masukan dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)?
3. Apakah Komite Sekolah berperan sebagai pendukung, pengontrol atau pengawasan terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MTs NW Maluk?
4. Apakah Komite Sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana Sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pendidikan di MTs NW Maluk?
5. Apakah ada Faktor pendukung dan penghambat peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs NW Maluk?

D. Wawan Cara Dengan Wakasek

1. Dengan adanya dana BOS, apakah masih ada pungutan biaya Komite Sekolah kepada orang tua peserta didik?
2. Bagaimana proses pembentukan komite Madrasah di MTs NW Maluk?
3. Apakah ada kriteria khusus dalam pembentukan komite sekolah di MTs NW Maluk?
4. Seberapa penting keberadaan komite di MTs NW Maluk??
5. Bagaimana pelayanan yang diberikan komite dalam pemberian pertimbangan di MTs NW Maluk?
6. Bagaimana kinerja dan program kerja komite sekolah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MTs NW Maluk?

E. Wawancara Dengan Komite Sekolah

1. Apakah komite sekolah memiliki program kerja?
2. Apakah Komite Sekolah memberikan pertimbangan dan masukan dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)?

3. Apakah Komite Sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di MTs NW Maluk
4. Apakah Komite Sekolah berperan sebagai penghubung atau mediator antar pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat?
5. Bagaimana kendala atau adakah factor pendukung atau penghambat bagi komite sekolah dalam menjalankan program kerja?
6. bagai mana peran organisasi NW dalam mendukung program kerja komite sekolah?

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Yuliana Sari

Nim : 16131005

Jurusan : Administrasi pendidikan

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah di MTs NW Maluk,
Jln. Amanah Desa. Mantun Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat.

1. Mellihat dan mengamati secara langsung kondisi dan letak geografis MTs NW Maluk.
 - a. sarana dan prasarana : gedung, buku, kelas, alat tulis, dll

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama : Yuliana Sari

Nim : 16131005

Jurusan : Administrasi pendidikan

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah di MTs NW Maluku,
Jln. Amanah Desa. Mantun Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat.

1. Sejarah/Latar Belakang .
2. Data-Data Keadaan Siswa
3. Data Mengenai Sarana Dan Prasarana Serta Barang Inventaris
4. Data-Data Struktur Organisasi Guru-Guru Dan Komite Sekolah
5. Rencana Kerja Komite Sekolah
6. laporan kerja komite sekolah

DAFTAR PUSTAKA

Abang. 2016. komite sekolah.

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-75-2016-komite-sekolah>. diakses pada 15 mei 2020

Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Amirunsyah, A Awie, Idris A, dan Hatuwe,M.2014.Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah SMK Negeri 5 Samarinda. eJournal “Adiministrative Reform.2 (4):2144-2155 ISSN 2338-7637.ar.mian.fisipunmul.ac.id.

Desy Angriani S.Pd. 2019 pentingnya peran komite sekolah untuk mutu pendidikan. <https://www.seputarriau.co/news/detail/7464/pentingnya-peran-komite-sekolah-untuk-mutu-pendidikan>. di akses pada 11 agustus 2020.

Diah Rachmawati Masita, (2018) Pengaruh Solidasi Stakeholder Terhadap Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Di Smp Muhammadiyah 15 Kenjeran Surabaya.

Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.ss

Kriswantoro.2013.implementasi kebijakan komite sekolah.<https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/2325/1928>.vol.1. diakses pada 20 mei 2020

Prof.dr nanang Fattah, M.Pd, manajemen berbasis sekolah (buku materi pokok PGSD), universitas terbuka 2005

Rafa black, 2019. kebijakan_pendidikan
.https://www.academia.edu/27322083/kebijakan_pendidikan .di akses pada 11
agustus 2020

Semar Jaya IS 2019.
Kebijakan_Pendidikan_Pengertian_dan_hakikat_kebijakan_pendidikan_Lat
ar_belakang_perlunya_kebijakan_pendidikan
https://www.academia.edu/38200974/Kebijakan_Pendidikan_Pengertian_dan_h
akikat_kebijakan_pendidikan_Latar_belakang_perlunya_kebijakan_pendidikan_d
ocx . di akses pada 11 agustus 2020

Sihaan, amiruddin, khairuddin W, irwan nasution, manajemen pendidikan berbasis
sekolah, (ciputat :quantum teaching) hal 146

Sirajuddin.2016.Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Agama Islam Di Sdn 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
Diakses Pada 5 Ocktober 2020

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta, PT : Rineka Cipta, 2004)
Hal :197